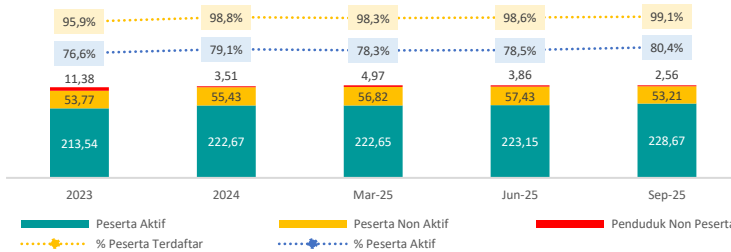


Monthly Report Monitoring JKN

30 September 2025

Kepesertaan dan Kesehatan Keuangan

Peserta Aktif dan Non Aktif dalam Juta Jiwa



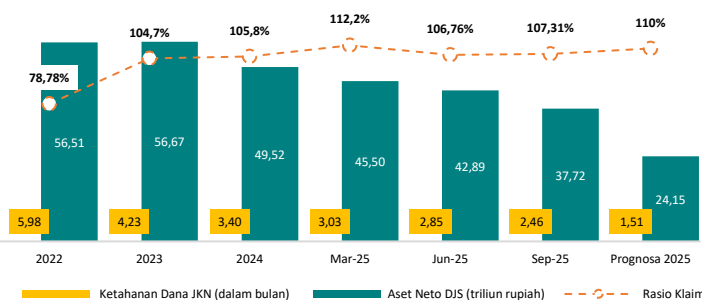
Sumber : BPJS Kesehatan dan BPS, diolah

No	Segmen Peserta	September 2025			
		Aktif	Non Aktif Menunggak	Non Aktif Mutasi	Total Peserta Terdaftar
1	Penerima Bantuan Iuran	96.662.673		19.262.029	115.924.702
2	PPU Penyelenggara Negara	19.542.523	24.057	820.996	20.387.576
3	PPU Non Penyelenggara Negara	38.263.979	132.257	8.349.848	46.746.084
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP)	17.464.328	13.933.334	1.734.438	33.132.100
5	Bukan Pekerja (BP)	4.857.277	31.678	406.754	5.295.709
	a. BP Penyelenggara Negara (BP PN)	4.413.237		359.666	4.772.903
	b. BP Swasta (BP Non PN)	444.040	31.678	47.088	522.806
6	PBPUP Pemda	51.879.879		8.516.557	60.396.436
	Total Peserta	228.670.659	14.121.326	39.090.622	281.882.607

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Peserta non aktif dikarenakan menunggak sejumlah 14,12 juta, terbanyak adalah dari segmen PBPUP Mandiri sebesar 13,93 juta (98,67%). Peserta non aktif dikarenakan proses mutasi sejumlah 39,09 juta, yang terdiri dari 19,26 juta dari segmen PBI, dan sebesar 8,5 juta dari segmen PBPUP Pemda. Sebesar 8,35 juta dari PPU Non PN disebabkan oleh perubahan status pekerjaan dan belum menentukan segmen kepesertaan JKN, 820,99 ribu peserta non aktif mutasi segmen PPU PN, dan diikuti segmen yang lainnya.

Kesehatan Keuangan DJS Kesehatan



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Aset Neto DJS Kesehatan diproyeksikan dapat membiayai 2,46 bulan kedepan (**sehat, namun rentan defisit**). Tanpa adanya bauran kebijakan segera, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan diproyeksikan mengalami risiko defisit aset neto dan gagal bayar pada semester I tahun 2026. **YoI DJS Kesehatan** sebesar 4,67% atau Rp3,19 triliun, dengan rata-rata kelolaan dana investasi sebesar Rp68,32 triliun selama Januari 2025 hingga September 2025, terbagi pada surat utang negara sebesar Rp18,97 triliun (27,8%), deposito sebesar Rp43,98 triliun (64,4%), dan SRBI sebesar Rp5,37 triliun (7,9%), target YoI sebagaimana Indikator Capaian Kinerja (ICK) tahun 2025 yang ditetapkan DJSN sebesar 7%.

Dana operasional BPJS Kesehatan tahun 2025 ditetapkan 3,55% dari penerimaan iuran program JKN, dan atau maksimal Rp5,98 triliun sebagaimana PMK 134/2024. Realisasi **Beban terhadap dana operasional + pendapatan investasi (BOPO)** berada diposisi **90,47%**, sesuai ketentuan Permenkeu 251 Tahun 2016 yang mengamahkan maksimal BOPO sebesar 95%. **YoI BPJS Kesehatan** sebesar 6,14% (neto), dengan perolehan imbal hasil investasi sebesar Rp689,9 miliar dari rata-rata portofolio Investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp11,23 triliun. Imbal hasil investasi BPJS Kesehatan sebagaimana ditargetkan oleh DJSN dalam ICK Tahun 2025 sebesar 7%.

Cakupan kepesertaan JKN Per 30 September 2025 telah mencapai 281,88 juta jiwa atau 99,1% dari penduduk Indonesia Tahun 2025. Cakupan peserta tumbuh 3,78 juta (1,36%) dibanding 31 Desember 2024. Berdasarkan cakupan peserta yang hampir menyeluruh, maka fokus dan strategi saat ini lebih menekankan pada meningkatkan keaktifan peserta JKN disemua segmen, khususnya sektor informal.

Capaian **kepesertaan aktif** sebesar 228,67 juta jiwa atau 80,4% dari jumlah penduduk, dan 81,12% dari keseluruhan peserta, peserta aktif tumbuh 2,70% atau 6 juta jiwa dibanding 31 Desember 2024, penambahan/penurunan peserta aktif didorong oleh beberapa segmen berikut :

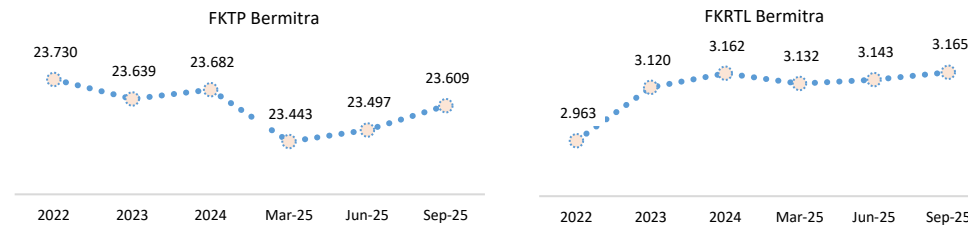
- **PBI JK** -21,88 ribu jiwa (-0,02%)
- **PPUPN** +601,69 ribu jiwa (+3,18%)
- **PPUBU** +818,13 ribu jiwa (+2,18%)
- **PBPUP** +251,44 ribu jiwa (+1,46%)
- **BP** -99,83 ribu jiwa (-2,01%)
- **PBPUP Pemda** +4,45 juta jiwa (+9,39%)

Per 30 September 2025, program JKN mencatatkan defisit operasional yang menyebabkan **penurunan aset neto Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp11,8 triliun (YTD)**. Hal ini terjadi karena realisasi beban jaminan kesehatan sebesar Rp139,4 triliun telah melampaui pendapatan iuran yang terkumpul sebesar Rp129,9 triliun, sehingga menghasilkan **rasio klaim sebesar 107,31%**. Perolehan pendapatan iuran mencapai 75,82% dari target tahun 2025. Tren penurunan aset neto dan rasio klaim di atas 100% ini telah berlangsung konsisten sejak 2023, hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan iuran tidak lagi dapat mengimbangi tingginya biaya layanan kesehatan.

Monthly Report Monitoring JKN

30 September 2025

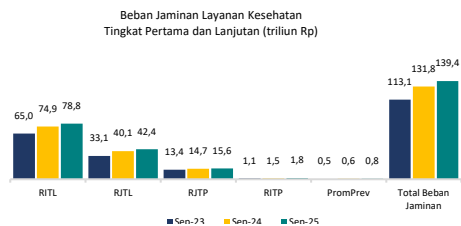
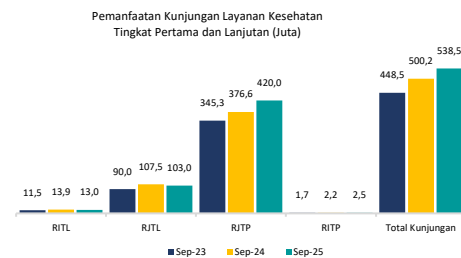
Kerjasama Faskes dan Utilisasi



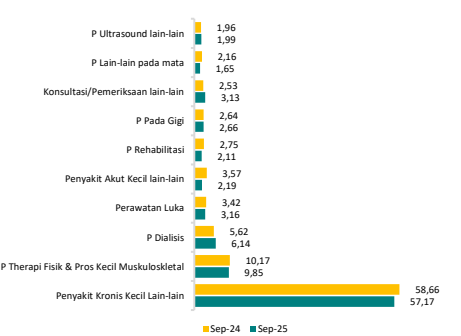
Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 135. **Kerja sama FKRTL tercatat 3.165**, bertambah 3 dibanding akhir 2024. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 4.838 apotek dan 1.254 optik sebagai fasilitas kesehatan penunjang. Capaian jumlah kerja sama FKTP belum memenuhi target ICK 2025 yang ditetapkan oleh DJSN, sedangkan FKRTL telah mencapai target tersebut.

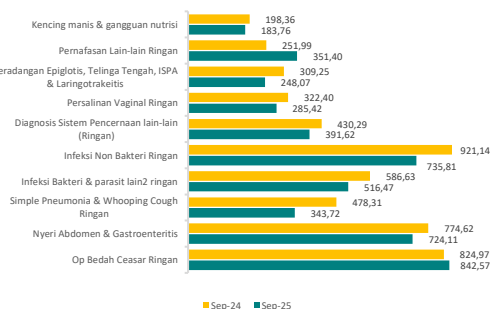
Per September 2025, **kerja sama dengan FKTP** tercatat sebanyak 23.609, turun 73 FKTP dibanding 31 Desember 2024. Penurunan terbesar berasal dari Dokter Praktik Perorangan (DPP) yang berkurang 193 menjadi 4.456. Sementara itu, klinik pratama



Sepuluh CBG's Terbanyak Pada Tingkat Layanan RJTL (satuan juta)



Sepuluh CBG's Terbanyak Pada Tingkat Layanan RITL (satuan ratusan ribu)



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Pemanfaatan layanan kesehatan hingga 30 September 2025 meningkat sebanyak 7,7% dibanding September 2024. Pemanfaatan tertinggi berasal dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebanyak 420 juta kunjungan, mengalami peningkatan 11,5% atau bertambah 43,4 juta dibanding September 2024. Selanjutnya diikuti oleh pemanfaatan layanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebanyak 103 juta kunjungan, menurun 4,2%. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebanyak 13 juta kunjungan, menurun 6,6% dan pemanfaatan layanan kesehatan terendah terdapat di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITP) sebanyak 2,5 juta, meningkat 15,8%. Berdasarkan hal tersebut, fungsi *gatekeeper* FKTP diharapkan semakin optimal dalam menyerap tingginya kebutuhan layanan primer peserta JKN. Efisiensi ini dipertegas dengan keberhasilan menekan beban di layanan yang lebih mahal, yaitu penurunan kunjungan RJTL dan RITL, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan efektifitas biaya Program JKN.

Beban Jaminan pada September 2025 mengalami peningkatan 5,8% dibanding September 2024, dari Rp131,8 triliun menjadi Rp139,4 triliun. Alokasi beban jaminan didominasi oleh Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar Rp78,8 triliun atau 56,5% dari total beban jaminan, diikuti oleh Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) sebesar 30,4%, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 11,2%, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1,3% dan terkecil adalah alokasi promotif dan preventif sebesar 0,6% dari total beban jaminan.

Pembayaran manfaat RJTL per September 2025 mencapai Rp42,4 triliun, naik 5,9% dibanding pembayaran manfaat RJTL pada September 2024. Jumlah kunjungan RJTL adalah sebesar 103 juta kunjungan, dengan diagnosa terbanyak di RJTL yaitu penyakit kronis kecil lain-lain, prosedur terapi fisik dan prosedur kecil muskuloskeletal, prosedur dialisis, perawatan luka, penyakit akut kecil-kecil lain, dan lain sebagainya. Penurunan kasus terbesar CBG's RJTL adalah indikasi efektifitas kendali mutu dan kendali biaya.

Pembayaran manfaat RITL hingga September 2025 mencapai Rp78,8 triliun, meningkat 5,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Kasus terbanyak didominasi oleh persalinan dengan operasi bedah caesar ringan, infeksi non bakteri (ringan), disusul oleh nyeri abdomen & gastroenteritis. Hampir semua kelompok INA-CBG's RITL pada September 2025 menunjukkan penurunan volume layanan dibandingkan September 2024, kecuali beberapa kasus spesifik. Tren ini mengindikasikan adanya perubahan pola rujukan dan/atau pergeseran layanan dengan kendali mutu dan kendali biaya yang lebih optimal. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa kebijakan kendali mutu dan biaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta, sehingga tidak menimbulkan hambatan akses layanan kesehatan yang seharusnya dapat diberikan di tingkat lanjutan.